

## TAJUK RENCANA

### Memburu Beking Penambangan Ilegal

**PERISTIWA** penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshari Jumat dini hari kemarin seakan mengkonfirmasi dugaan selama ini bahwa ada beking di balik penambangan ilegal. Ryanto ditembak mati diduga karena hendak mengungkap praktik tambang ilegal yang dibekingi Dadang Iskandar. Pelaku yang merasa kepentingannya terganggu, diduga sengaja menembak mati korban, tepat di bagian kepala. Artinya, penembakan itu bukan dilakukan secara spontan, melainkan telah ada unsur perencanaan.

Kasus polisi tembak polisi ini kini ditangani Polda Sumatera Barat (Sumbar). Polda Sumbar masih mengumpulkan saksi dan barang bukti. Kesimpulan sementara, ada motif kesengajaan dan perencanaan pelaku menghabisi korban. Indikasi ini terlihat dari tindakan persiapan yang dilakukan korban dengan membawa 2 magazine, di mana satu magazine berisi 15 butir peluru, sedang magazine lainnya berisi 16 butir peluru, di kantong celananya juga terdapat 11 butir peluru. Ini menjadi indikasi bahwa pelaku telah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum menembak korban (KR 24/11)

Puncaknya, korban yang sedang melakukan penegakan hukum tak mau memenuhi permintaan pelaku untuk melepaskan sopir truk yang terkait dengan aktivitas penambangan ilegal. Usai menembak korban, pelaku mendatangi rumah dinas Kapolres dan melakukan serentetan tembakan hingga mengenai kaca rumah. Kapolres Solok Selatan yang saat itu berada di dalam rumah selamat dari aksi penembakan yang dilakukan anak buahnya. Pertanyaannya, mengapa rumah daan

Kapolres juga menjadi sasaran tembak ? Inilah yang sedang diselidiki petugas.

Kasus polisi tembak polisi memang bukan fenomena baru. Kasus di atas menggambarkan secara jelas bahwa dalam aktivitas penambangan ilegal ada beking yang notabene dilakukan aparat kepolisian, atau lebih tepat kita sebut oknum. Benarkah beking itu hanya berhenti sampai pada AKP Ryanto Ulil Anshari ? Kita tidak terlalu yakin. Karena itulah, kita mendukung pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar kasus tersebut diungkap tuntas dan transparan. Hemat kita, penegakan ini penting, bukan semata terkait kasus di Solok Selatan, melainkan juga di wilayah lain.

Kita mengenal wilayah Solok Selatan, Sumatera Barat, sebagai daerah yang kaya tambang emas, sehingga wajar menjadi rebutan para penambang, baik legal maupun ilegal. Hal yang disebut terakhir inilah yang acap luput perhatian, karena dianggap sebagai penambangan rakyat biasa. Padahal secara hukum mereka tidak mengantongi izin penambangan, untuk itulah disebut ilegal. Namun praktik ilegal ini terus berlangsung, mengapa ? Karena memang ada yang membekingi. Mereka menerapkan prinsip simbiosis mutualis atau saling menguntungkan. Ketika kepentingannya terganggu, tentu akan berteriak dan mencari cara untuk menghadapinya.

Agaknya itulah yang terjadi pada kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Kita mendukung langkah Kapolri untuk memberantas penambangan ilegal, termasuk memburu dan menangkap bekingnya. Pun tak cukup hanya dilakukan di Solok Selatan, melainkan juga wilayah lain, terutama yang memiliki kekayaan alam tambang melimpah. Kita berharap, jangan sampai negara kalah melawan beking. □ - d

# Rakyat untuk Tahta

## Imam Anshori Saleh

hiruk pikuk kampanye menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, penulis mendapatkan gambaran sebaliknya. Jika SHB IX sebagai Raja Yogya, kemudian sempat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia (1973-1978), benar-benar mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat, maka para calon kepala daerah

**MENYAKSIKAN** hiruk-pikuk kampanye Pilkada Serentak dua bulan terakhir ini penulis teringat pada sebuah buku "Tahta untuk Rakyat". Buku setebal 388 halaman terbitan tahun 1982 itu dihimpun oleh Mohamad Room, Muchtar Lubis dkk., disunting oleh Atmakusuma. Pembaca buku itu memperoleh gambaran yang jelas tentang celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (SHB IX), Raja Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Buku itu bercerita tentang perjalanan panjang SHB IX yang genap berusia tujuh puluh tahun, 12 April 1982. Kenangan atas proses perubahan sebuah kekuasaan yang menyatu dengan perkembangan pribadi seorang raja di masa modern. Sri Sultan lahir di tengah keagungan. Sejak tahun 1940 tahta itu, warisan tradisi kerajaan yang berabad-abad usianya dan menjadi hak istimewa dari turunan keluarga raja, diperbaharui secara mengesankan oleh seorang arsitek kekuasaan. Kekuasaan tradisional yang memperoleh legitimasi dari falsafah leluhur yang penuh mistik, diberi bentuk dan eksistensi baru : perpaduan pola fedoalitis dan corak demokratis. Sebuah kekuasaan yang peka menanggapi amanat penderitaan rakyat.

SHB IX bukan hanya pemimpin DIY. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 diumumkan oleh Soekarno dan Moh Hatta, SHB IX segera mengambil sikap tegas. Dua hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator.

SHB IX bersama Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat pada 5 September 1945 yang menyatakan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Keputusan ini menandai awal dari era modern bagi Yogyakarta yang tidak lagi menjadi entitas negara sendiri, tetapi berfungsi sebagai bagian dari negara republik. Kala kas negara kosong setelah proklamasi kemerdekaan, SHB IX berinisiatif menyumbang sebagian kekayaan yang dimiliki Keraton untuk kas negara sekitar 6,5 juta gulden. Jumlah yang sangat besar waktu itu

### Bertolak belakang

Ketika menyaksikan dan mencerna



KR-JOKO SANTOSO

(gubernur, bupati, walikota dengan para calon wakilnya) benar-benar mengeksploitasi rakyat untuk menggapai tahta (kekuasaan) selama lima tahun.

SHB IX tidak pernah meminta dukungan rakyat, karena dirinya naik tahta berdasar warisan leluhurnya sebagai anak raja. Tahta diperolehnya secara turun temurun, baik sebagai raja maupun sebagai Gubernur DIY. Rakyat tidak pernah mempersoalkan bahkan selalu mengukuhkan tahta atau kekuasaan itu kepada SHB IX. Kemudian karena bakti rakyat yang sangat besar kepada Raja Mataram itu muncul model "pasrah" penyerahan diri dengan sebutan "pejah gesang nderek gusti" (mati atau hidup ikut raja). Penyerahan diri yang benar-benar tulus, tanpa menebar beras, minyak goreng atau kaos dan lainnya. Pemimpin yang tidak membutuhkan "endorse" dari siapa pun.

Sementara itu lihatlah para calon kepala daerah di seluruh Indonesia pada umumnya berusaha keras meng-

gaet rakyat agar dalam pencoblosan yang dilakukan serentak memberikan suara mereka untuk memilih dirinya. Hiruk pikuk sejak awal membangun penggalangan suara melalui berbagai cara. Mulai dengan menggalang dukungan partai politik, organisasi massa, *endorse* para pemimpin yang berpengaruh dari tokoh formal maupun informal seperti kiai pesantren, pemimpin gereja, tokoh kelompok etnis, dan lainnya. Juga penggalangan

melalui pemberian bantuan sembako, kaos, dan materi lainnya. Dalam masa kampanye yang berakhir 23 November lalu berlangsung secara masif penyebaran gambar melalui pemasangan baliho, spanduk, videotron, media massa, media sosial, dan lainnya.

Semuanya ingin mendapatkan suara rakyat sebanyak-banyaknya dan meraih kemenangan dalam pilkada. Semua cara itu bisa disebut sebagai model eksploitasi terhadap rakyat demi tahta atau kekuasaan yang ingin diraih. Sehingga pantas disebut "Rakyat untuk Tahta". Ini bertolak belakang dengan yang terjadi di masa lalu kala SHB IX benar-benar menjadikan tahta yang diperolehnya dari rakyat secara "genuine" yang kemudian dilegitimasi oleh negara. Kita semua merindukan pemimpin yang tulus seperti SHB IX, pemimpin yang mampu menyelenggarakan kepemimpinan tradisional dengan kepemimpinan yang dibutuhkan di era demokrasi modern kini.\*\*\*

**\*)Dr Imam Anshori Saleh SH MH, Anggota DPR-RI (2004-2009), Wakil Ketua Komisi Yudisial RI (2010-2015).**

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.

Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,

Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE

**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Wijidjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkr23@yahoo.com, iklanlkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

**Wartawan:** H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Mewaspada Godaan Politik Uang

### Yulianta Saputra

**MASA** kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah selesai pada hari Sabtu 23 November lalu. Selanjutnya, tanggal 24, 25, dan 26 November, kita memasuki masa tenang dan pada Rabu 27 November dilaksanakan pemungutan suaranya. Pilkada kali ini diikuti tak kurang dari 545 daerah dengan rincian memilih gubernur di 37 provinsi, bupati di 415 kabupaten, serta wali kota di 93 kota secara bersamaan.

Dapat dibayangkan, betapa banyak sumber daya dikerahkan guna melaksanakan Pilkada serentak itu. Banyak *stakeholder* terkait mesti iberjibaku mengawalinya. Saban kandidat jua skuadnya niscaya berlomba-lomba mengerahkan segala cara demi memenangkan kontestasi ini. Musabab itu, potensi berbagai pelanggaran dan penyalahgunaan di lapangan bisa sangat besar.

Tak terkecuali perihal politik uang. Bahkan, bisa dibilang *money politics* menjadi salah satu tantangan terbesarnya. Potensi *money politics* menjadi kian memprihatinkan tatkala menilik hasil survei Indikator Politik Indonesia beberapa waktu silam yang menandakan bahwasanya sebanyak 46,9% responden menyebut bahwa politik uang bisa ditoleransi dan ihwal yang wajar.

Ihwal ini berarti sangat mungkin para pemilih di negeri ini masih jamak yang bersikap amat transaksional selama proses pilkada. Padahal, pemimpin yang lahir dari proses nan keliru bertendensi melakukan praktik kepemimpinan dalam masa jabatannya dengan tak benar pula. Pertanyaan yang layak diajukan, bagaimana supaya problematika politik uang bisa dieradikasi atau setidaknya tidaknya diminimalisir agar hak pilih warga dalam Pilkada konstan terjaga?

Pertama, harus ada keinsafan para peserta Pilkada betapa politik uang

bukanlah cara elegan memenangi kontestasi tersebut. Malahan dapat dikatakan sesungguhnya *money politic* merupakan mekanisme teramat busuk. Di sini tentu para petinggi partai dapat memberi tahu para kandidat kepala daerah jua calon wakilnya sebaiknya mempunyai kepercayaan yang tinggi kala berkontestasi.

Kedua, mesti ada kesadaran publik bahwa menerima uang saban kontestasi Pilkada bukanlah berkah melainkan musibah nan harus dihindari. Politik uang sejatinya merendahkan martabat rakyat yang notabene pemberinya jua pasti tak punya harkat. Masyarakat harus distimulasi menampik politik uang dengan diberi cakrawala bahwa menerima uang dalam Pilkada identik mau idjebaki untuk sekadar memenangkan sang pemberi uang. Ringkasnya, di sini khalayak justru dijauhkan dari cita-cita mendapatkan pemimpin yang mumpuni memajukan wilayahnya.

Ketiga, wajib ada sanksi tandas bagi peserta Pilkada yang melakukan politik uang. Diinsafi *money politics* bisa ada lantaran pelakunya tak merasa akan diberi sanksi tegas jikalau konstan melakukannya. Paling tidak, ada *punishment* hingga diskualifikasi bagi yang memberikan uang kepada pemilih. Kita menduga kuat, apabila calon kepala daerah jua kandidat wakilnya semenjak semula bermain politik uang, diindikasikan berimbas pada keluaran *beleid* yang diambil syahdan berniat mengembalikan imodali Pilkada yang dikeluarkan-

nya. Pilkada sejatinya momentum mengkonsolidasikan demokrasi di aras lokal. Penentuan progres atau regresi daerah termasuk masyarakatnya dalam beberapa tahun ke depan sangat ditentukan dari pertarungan politik elektoral yang akan berlangsung. Atas kausa itu, maka Pilkada sebenarnya jua merupakan momen mengedukasi khalayak agar memiliki kemelekan dan kedewasaan berdemokrasi.

Akhirnya, jangan sampai Pilkada Serentak 2024 ini sarat keculasan dengan masifnya politik uang. Mengatasi *money politics* dalam pesta demokrasi niscaya membutuhkan kolaborasi Bawaslu, partai politik, penegak hukum, serta publik. Edukasi politik perenial dan asertifnya penegakan hukum jadi kunci meminimalisir praktik *keblinger* ini. Semua itu demi masa depan demokrasi (lokal) lebih kalis. Bagaimanapun kita butuh pilkada berintegritas nir-politik uang. (\*)-d

**\*)Yulianta Saputra SH MH CM, Dosen Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

## Pojok KR

PCNU Kota: pemberi dan penerima politik uang masuk neraka.

- **Celakanya kalau mereka tak percaya neraka.**

\*\*\*  
Jelang Pilkada serentak, politik uang masih marak.

- **Penyakit laten yang tak gampang dibenarkan.**

\*\*\*  
Gubernur Bengkulu kena OTT KPK.

- **Mungkin mereka bilang sedang apes.**

*Beraksi*